COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN SLEMAN

Sukanti¹⁾ Nur Faidati²⁾

1)Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora,
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

2)Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora,
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Kasus *stunting* di Kabupaten Sleman setiap tahunnya mengalami penurunan, tahun 2015 sebesar 12,86%, tahun 2016 sebesar 11,88%, tahun 2017 sebesar 11,99%, tahun 2018 sebesar 11%, dan ditahun 2019 sebesar 8,38%. Permasalahan *stunting* tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, melainkan perlu campur tangan dari pihak lain. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model *collaborative governance*, peran setiap *stakeholder*, dan desain kelembagaan dalam upaya penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* yang diukur dengan dinamika kolaborasi yakni keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama secara keseluruhan sudah cukup baik, namun beberapa indikator belum berjalan dengan baik, yaitu belum tersedia forum komunikasi secara khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masih kurangnya peran swasta. Tindakan kolaborasi berbentuk inovasi kegiatan dalam penanggulangan *stunting* pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti penolakan dari masyarakat, kondisi lingkungan kurang sehat, dan pekerjaan orang tua yang mempengaruhi pola asuh. Faktor pendukung sendiri seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan anggaran. Dampak *collaborative governance* ini adalah menurunnya angka *stunting* dan masyarakat lebih teredukasi. Kolaborasi ini menghasilkan desain kelembagaan berupa pola akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sleman berupa perlunya melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan peran swasta, seluruh *stakeholder* memperkuat komitmen, dan meningkatkan koordinasi antar *stakeholder*.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Stunting, Stakeholder.*

Abstract

Stunting prevalence in Sleman district every year is decreased, in 2015 by 12,86%, in 2016 by 11,88%, in 2017 by 11,99%, in 2018 by 11%, and in 2019 by 8,38%. Stunting problems cannot be solved by one party, but it needs intervention from the other party. Therefore, the purpose of this research is to know the model of collaborative governance, the role of every stakeholder, and the institutional design in stunting prevention efforts in Sleman Regency. This study used qualitative research method. Data were obtained by interview techniques, observations, and documentation. Furthermore, the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of collaborative governance as measured by the dynamics of

collaboration, namely principled engagement, shared motivation, and overall joint action capacity has been quite good, but some indicators have not gone well, namely the communication forum is not available specifically at the District Government level and still lack of private roles. Collaboration actions are in the form of innovation in preventing stunting activities, the implementation of which there are inhibitory factors such as rejection from the community, unhealthy environmental conditions, and the work of parents that affect parenting patterns in children as well as supporting factors such as human resources, natural resources, and budget. The impact of collaborative governance is the decrease in stunting rates and more educated communities. This collaboration resulted in an institutional design in the form of a pattern of accountability. Based on the results of the study, the author gave advice to the Sleman Regency Government in the form of the need to conduct monitoring and evaluation, increase the role of the private sector, strengthen all stakeholders' commitments, and improve coordination between stakeholders.

Keywords: Collaborative Governance, Stunting, Stakeholders.

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan secara berkelanjutan yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam, serta menjadi acuan dalam kerangka pembangunan di negara-negara yang ada di dunia. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai salah satunya adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Masalah gizi di Indonesia saat ini menjadi salah satu hal yang sangat serius. Dibuktikan dengan adanya prioritas penanganan *stunting* pada anak. Hal ini sesuai dengan tujuan SDGs yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dalam *Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya (Kemenkes 2018). Ramayulis dkk (2018) menyatakan bahwa *stunting* atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi usia 0-11 bulan dan balita usia 12 – 59 bulan akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya. Menurut Ramayulis dkk

(2018) *stunting* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya praktik pengasuhan gizi yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Selanjutnya Batiro Bancha dkk (2017) faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya *stunting* yaitu 1) penyakit infeksi seperti diare dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). 2) keterlambatan pemberian Air Susu Ibu (ASI). 3) Tidak melakukan imunisasi. 4) Defisiensi makanan hewani. 5) Sumber air yang tidak aman.

Masalah balita pendek atau *stunting* ternyata tidak hanya di hadapi Indonesia, tetapi merupakan masalah yang juga dihadapi oleh dunia. Data tahun 2017 menunjukkan sebanyak 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami *stunting*. (Kemenkes 2018). *Stunting* di Indonesia berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 untuk status gizi sangat pendek pada balita sebesar 18,0% dan tahun 2018 sebesar 11,5%. Sedangkan status gizi pendek pada balita mengalami sedikit kenaikan, yaitu di tahun 2013 sebesar 19,2% dan pada tahun 2018 sebesar 19,3% (Kemenkes 2018), untuk *stunting* di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mencapai angka 19,8% (Aditya : 2018). Angka prevelensi balita *stunting* di Kabupaten Sleman setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan dimana di tahun 2019 menetapkan target angka prevalensi sebesar 11,54%, dan hasilnya yaitu tahun 2015 sebesar 12,86%, tahun 2016 sebesar 11, 88%, tahun 2017 sebesar 11,99%, tahun 2018 sebesar 11%, dan tahun 2019 sebesar 8,38%. (Dinkes Sleman 2020)

Menanggulangi *stunting* diperlukan tindakan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, yaitu intervensi gizi yang dibagi menjadi dua bagian *Pertama*, intervensi gizi spesifik kontibusinya mencapai 30%, *Kedua*, intervensi gizi sensitive memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu 70%. Hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum dan menyeluruh. Pelaksanaan intervensi gizi sensitif pada dasarnya menyasar masyarakat umum tanpa terkecuali, kegiatan ini berupa pembangunan dalam bidang non-kesehatan antara lain penyediaan air bersih, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender, dan sebagainya (Dinkes Kabupaten Sleman 2020). Sebagai bentuk dukungan dari daerah yaitu

dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 anggaran di Kabupaten Sleman berdasarkan indikator kinerja program status balita gizi buruk dan cakupan balita pendek dan sangat pendek, yaitu sebesar Rp.599,149,250.00, untuk tahun 2019, tahun 2020 sebesar Rp.629,106,712.50, dan tahun 2021 sebesar Rp.660,562,048.13. Namun demikian, jika didefinisikan lebih lanjut permasalahan yang mendasari terjadinya stunting di Kabupaten Sleman cukup kompleks perlu adanya kolaborasi dari berbagai sektor untuk bekerja bersama-sama dalam mengintervensi kasus stunting tersebut. Dalam konteks Administrasi Publik konsep kolaborasi atau kerja bersama sebagaimana di gambarkan di atas sering disebut sebagai *collaborative governance*.

Collaborative governance pada dasarnya untuk menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus hal ini menurut Ansell dan Gash (2008) dalam Islamy (2018). Istilah *collaborative* adalah lebih menunjukkan deliberative dan pendekatan berorientasi konsensus untuk pengambilan keputusan (Agbodzakey, 2011). Menurut Ansell dan Gash (2008) dalam Emerson (2011) fenomena pemerintahan di dunia beberapa dekade terakhir menunjukan bentuk baru pemerintahan, yang muncul untuk menggantikan berbagai modus pengambilan kebijakan dan implementasi. Model baru tersebut ialah pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Model tersebut bercirikan pelibatan stakeholder swasta publik dan masyarakat bersama-sama dalam suatu forum kolektif dengan badan-badan publik untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Emerson dkk (2011) juga menawarkan definisi yang lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama. Berdasarkan definisi diatas

collaborative governance merupakan suatu tindakan kerjasama antar berbagai organisasi atau instansi yang terdiri dari pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Collaborative Governance menurut Choi (2014) terdapat tiga pendekatan di dalamnya, yaitu :

1. *Collaborative Governance* dalam pendekatan Deskriptif dan Eksplanatori merupakan Pendekatan dalam teori administrasi publik bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fakta sosial.
2. *Collaborative Governance* dalam Pendekatan Normatif Menurut Bailey, (1968) dalam Islamy (2018) secara normatif teori administrasi publik membahas tentang nilai-nilai publik seperti kepentingan publik (*public interest*), ekuitas, dan akuntabilitas, serta kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kepentingan relatif dari berbagai nilai publik dan bagaimana memilih satu untuk mengejar.
3. *Collaborative Governance* dalam Pendekatan Instrumental yaitu metode, alat, dan strategi yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan publik (Baily, 1968) dalam Islamy (2018).

Ilmu Administrasi yang di dalamnya terdapat *collaborative governance* yang merupakan suatu kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh beberapa aktor di dalamnya seperti pemerintah, masyarakat, swasta, amupun LSM untuk mengambil suatu keputusan secara. Untuk menggambarkan hal tersebut maka dibutuhkan model kolaborasi, adapun model kolaborasi dalam penelitian ini adalah model Ansell and Gash, yaitu :

Gambar 1.2 Model *Collaborative Governance* Ansell and Gash

Sumber : Emerson dkk (2011)

Model Ansell and Gash merupakan salah satu model *collaborative governance* yang memiliki empat variabel menjadi pusat perhatian, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Variabel tersebut dapat diperkecil lagi menjadi sub variabel. Untuk variabel proses kolaborasi merupakan inti dari model ini. Sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan merupakan pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi. Kondisi awal sebuah organisasi sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, konflik dan modal sosial dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam kolaborasi. Desain kelembagaan dapat berfungsi sebagai aturan dasar dalam melakukan suatu kolaborasi, serta kepemimpinan sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008).

Keberhasilan suatu kolaborasi membutuhkan suatu landasan berupa prinsip untuk dipahami oleh semua pihak atau stakeholder di dalamnya supaya mengetahui tanggung jawab serta peran masing-masing dalam menjalankan sebuah kolaborasi sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk itu diperlukan prinsip kolaborasi yaitu menurut Suharyanto (2005; 92 dalam Purwanti (2016) yakni Keserasian dan

Keterpaduan antara Kebijakan Fiskal, Moneter, Anggaran, serta Sektor Riil. dan Pemberdayaan (*empowering*). Selain prinsip di atas terdapat prinsip utama menurut Seigler (2011: 968-970), (1) Warga masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik. (2) Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik, (3) Tenaga profesional harus berbagi keahlian mereka untuk memberdayakan warga masyarakat, (4) Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik, (5) Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan, (6) Kebijakan harus strategis, (7) Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik, (8) Kebijakan harus mengandung akuntabilitas

Colaborative Governance Regime (CGR) dalam kerangka integratif yang diusulkan oleh Emerson, Nabatchi dan Balogh (2011) terdapat dimensi yang digambarkan pada bentuk kotak-kotak yang mewakili sistem kolaborasi secara umum. Dimensi kolaborasi digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 The Integrative Framework of Collaborative Governance

Sumber : Emerson dkk (2011)

Berdasarkan gambar 1.2 terbagi menjadi beberapa dimensi dalam *collaborative governance*, yaitu :

1. Dimensi pertama digambarkan pada bagian kotak yang terluar yang merupakan ruang lingkup atau *system context* yang menaungi, hal ini terlihat di kotak terluar yang digambarkan garis utuh yang didalamnya terdapat penyelenggaraan politik, hukum, sosial, ekonomi, lingkungan serta pengaruh lain yang berdampak pada kolaborasi.

2. Dimensi yang kedua merupakan bagian konsep *Collaborative Governance* yang terdiri dari dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi, hal ini digambarkan dengan garis putus-putus.
3. Dimensi Ketiga terdiri dari dari dinamika kolaborasi yang terdiri atas tiga elemen dasar yang digambarkan oleh kotak yang paling dalam dengan garis titik-titik, dimana terdapat tiga komponen yakni keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama.

Ansell and Gassh (2008) dalam Emerson dkk (2011) menyampaikan beberapa dinamika dalam *collaborative governance* yang mana sebagai sebuah aktifitas yang terjadi dalam sebuah kolaborasi yang berlangsung secara berulang kali guna mencapai sebuah tujuan bersama, adapun dinamika *collaborative* yaitu :

1. Keterlibatan Berprinsip (*Discovery, Definition, Deliberation, and Determination*)
2. Motivasi Bersama (*mutual trust, mutual understanding*, legitimasi internal, dan komitmen)
3. Kapasitas Aksi Bersama (*Procedural and Institutional Arrangement*, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya)

Dinamika *collaborative governance* dapat terwujud jika terdapat suatu tindakan kolaborasi. Menurut Emerson dkk (2011) menyatakan bahwa tindakan kolaborasi pada umumnya tata kelola kolaborasi diciptakan untuk mendorong tindakan atau tujuan yang tidak bisa tercapai oleh satu pihak organisasi. Terlaksananya tindakan kolaborasi nantinya akan memberikan dampak terhadap permasalahan yang sedang diselesaikan secara bersama. Emerson dkk (2011) yang mengacu pada Innes dan Booher (1999) menyatakan bahwa dampak merupakan dampak merupakan efek dari hasil lapangan yang mana terbagi menjadi dua yakni dampak secara sengaja dan dampak secara tidak sengaja. Maka tujuan diadakannya penelitian *collaborative governance* dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Sleman untuk mengetahui model *collaborative governance*, peran setiap *stakeholder* atau pemangku kepentingan, dan untuk mengetahui desain kelembagaan dalam pelaksanaan *collaborative governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Sebagai lawannya dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induksi, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono :2016). Penelitian ini berusaha menggambarkan kenyataan yang ada dilapangan yang melibatkan beberapa *stakeholder* dalam pelaksanaan *collaborative governance* sebagai upaya penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Sleman hal ini dikarenakan *stunting* sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan, serta di Kabupaten Sleman angka prevalensi *stunting* setiap tahunnya mengalami penurunan dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan terutama di tahun 2019.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu *pertama*, teknik *interview* (wawancara) dalam pelaksanaannya wawancara dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Puskesmas Ngaglik II, Puskesmas Minggir, Posyandu Melati Desa Dukuhan Kecamatan Minggir, Posyandu Melati Wonosari Kecamatan Ngaglik, Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Sleman, Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Nogotirto, dan Bidan Desa Kecamatan Minggir. *Kedua*, observasi yang dilakukan dengan melakukan tinjauan langsung kelapangan untuk melihat bagaimana kondisi dalam upaya penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman. *Ketiga*, dokumentasi yang berupa pengumpulan data yang berupa foto, gambar, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan *stunting* di Kabupaten Sleman yang dapat dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan medias sosial. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan yaitu menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017) yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verivication*.

PEMBAHASAN

1. Dinamika Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman

a. Keterlibatan Berprinsip

Keterlibatan berprinsip dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman pada dasarnya sudah baik dengan melibatkan banyak *stakeholder* dalam menjalankan kolaborasi, hanya saja belum terlalu fokus melibatkan pihak swasta dalam penanggulangan *stunting*. Adapun *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman, yaitu :

1) Pemerintah

Penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman melibatkan pihak pemerintah dalam kolaborasi, adapun pihak pemerintah yang ikut serta dalam penanggulangan *stunting*, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Sleman, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian, Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Slema, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman, Puskesmas, Pemerintah Desa, dan Posyandu.

2) Swasta

Kolaborasi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman ini terdapat pihak swasta di dalamnya yang berkontribusi seperti pengabdian masyarakat, pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan, atau dalam bentuk materi atau

barang yang berkaitan dengan *stunting*, yaitu Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Sleman, Prodi Gizi Jurusan Gizi Poltekes Kemenkes Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Ikatan Istri Pimpinan BUMN Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang, Pengurus Ranting Nogotirto.

3) Masyarakat

Masyarakat merupakan elemen penting dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman, selain sebagai sasaran dalam penanggulangan *stunting* namun juga sebagai aktor yang berperan dalam penanggulangan *stunting*. Adapun pihak masyarakat yang ikut serta dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman, yaitu Karang Taruna, Balita, Remaja Putri, dan Tim Penggerak PPK.

Kolaborasi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman diperlukan forum komunikasi untuk membahas masalah yang berkaitan dengan *stunting*. Sejauh ini ditingkat Daerah atau Kabupaten belum terdapat forum Khusus untuk membahas masalah *stunting*, hanya saja ditingkat bawah yaitu Kecamatan, Pemerintah Desa, Puskesmas, Posyandu sudah terdapat forum untuk membahas masalah *stunting* yang dilakukan secara rutin sesuai yang telah ditetapkan.

b. Motivasi Bersama

Motivasi bersama menurut Emerson dkk (2011) merupakan siklus memperkuat diri yang terbentuk dari unsur kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Pelaksanaan kolaborasi dalam upaya penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman sudah membangun kepercayaan diri dengan para *stakeholder* yang terlibat, dimana mereka saling terlibat sesuai dengan perannya masing-masing dan telah menjalin komunikasi yang baik satu sama lain, seperti dari Dinas Kesehatan menuju paling bawah yaitu puskesmas, desa, dan posyandu.

Stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman telah memahami peran, kompetensi, dan keahlian dari setiap *stakeholder*. Keberhasilan dalam penurunan angka *stunting* di Kabupaten Sleman mampu menciptakan pemahaman bersama. Namun hal ini tidak berlaku untuk semua *stakeholder* dikarenakan terdapat peran yang berbeda-beda dalam hal penanggulangan *stunting* yang terbagi menjadi dua yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang mengakibatkan pemahaman yang tercipta tidak merata dan tidak sama.

Legitimasi internal merupakan pengakuan dari dalam suatu organisasi atau instansi, dimana para *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas yang baik. Legitimasi internal sendiri juga melihat bagaimana koordinasi yang terjalin baik di dalam maupun diluar instansi. Koordinasi yang dilakukan oleh internal masing-masing *stakeholder* sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya rapat rutin dan koordinasi secara *online* untuk membahas masalah yang berkaitan dengan *stunting* di Kabupaten Sleman.

Komitmen yang dibangun dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman sangat baik. Setiap *stakeholder* memiliki visi dan misi yang digunakan sebagai acuan untuk penanggulangan *stunting*, serta memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Sleman. Bentuk komitmen lain dari para *stakeholder* yaitu keselarasan program atau kegiatan dalam penanggulangan *stunting* dari tingkat daerah sampai dengan paling bawah yaitu posyandu. Selanjutnya setiap pihak *stakeholder* yang terlibat menjalankan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing yang tercantum pada Petunjuk Teknis yang telah dikeluarkan bersamaan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Stunting.

c. Kapasitas Aksi Bersama

Kapasitas aksi bersama merupakan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Stunting, Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 76, serta terdapat kebijakan yang memiliki korelasi terhadap *stunting* yaitu Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Peran serta pemimpin dalam kolaborasi ini dibuktikan dengan pengeluaran Surat Keputusan yang berkaitan dengan *stunting* serta menetapkan kebijakan yang menyangkut peran setiap *stakeholder* dalam penanggulangan *stunting*. Selanjutnya pengetahuan yang berupa distribusi informasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholder* yang berkaitan dengan *stunting* di Kabupaten Sleman secara keseluruhan sudah baik, hal ini dibuktikan dengan penyebaran informasi yang menggunakan banyak media sehingga dapat diakses masyarakat dengan mudah, adapun media yang digunakan dalam distribusi informasi yaitu Whatshapp, Instagram, Website, poster, *leaflet*, youtube, dan surat. Informasi yang diberikan berupa jumlah *stunting*, resiko *stunting*, 1000 Hari HPK, Inovasi Kegiatan, pola asuh, Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), dan sebagainya. Sehingga *stakeholder* atau masyarakat dapat memahami tentang *stunting* lebih mendalam.

Sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu materil dan Sumber Daya Manusia. Secara materil dalam menanggulangi masalah *stunting* di Kabupaten Sleman terdapat anggaran yang berasal dari APBD, Dana PNPM, Dana Desa, Dana Iuran masyarakat seperti posyandu dan RT setempat yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan yang berkaitan dengan *stunting*. Selanjutnya dukungan Sumber Daya Manusia yang ada di

Kabupaten Sleman sudah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan baik ditingkat Daerah atau Kabupaten dan kecamatan, desa, posyandu, puskesmas dan lainnya, dan telah diberikan pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan *stunting*.

2. Aksi atau Tindakan *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Sleman

Aksi atau tindakan dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman merupakan suatu bentuk program berkaitan dengan *stunting*. Aksi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman berupa inovasi program penanggulangan *stunting* yang telah diciptakan oleh pemerintah atau program setiap *stakeholder* yang terlibat di dalamnya, dimana program ini dilaksanakan dari tingkat pemerintah daerah sampai tingkat desa, serta dari aktor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Adapun program dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman, yaitu :

- a. Program Inovasi Gerakan Tanggulangi Anemia Remaja dan Thalasemia (GeTAR Thala) merupakan bentuk kegiatan dengan pemberian Tambah Darah.
- b. Program Inovasi Pelayanan Antenatal Care Terpadu menuju Triple Eliminasi Melibatkan Semua Layanan (PANdu TEMan) merupakan program yang terdiri dari beberapa pelayanan bagi ibu hamil yang dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan standar pelayanan minimal dibidang kesehatan.
- c. Program Inovasi Pencegahan Pada Rawan *Stunting* (Pecah Ranting) merupakan program penanggulangan *stunting* dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil dan balita serta balita menimbang untuk memantau status gizi balita di Kabupaten Sleman.
- d. Program Inovasi Gerakan Ajak Menimbang Cegah dan Atasi *Stunting* (Gambang *Stunting*) merupakan kegiatan dalam bentuk mengajak menimbang pada balita yang dilakukan secara rutin untuk memantau pertumbuhannya.

- e. Pembagian Sembako atau Makanan Tambahan bagi anak yatim piatu untuk mencegah *stunting* dan memperbaiki gizi anak.
- f. Program GRAS merupakan Gerakan 'Aisyiyah Sehat. GRASS memiliki program yang di dalamnya mencakup *stunting*, Kesehatan reproduksi remaja, kesehatan ibu dan KB, Kesehatan bayi dan anak, gizi anak dan balita, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta PHBS.
- g. Inovasi telur fungsional merupakan suatu program yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada berupa telur yang memiliki kandungan lebih bermanfaat untuk pertumbuhan anak serta untuk ibu hamil yang ada di Kabupaten Sleman untuk mencegah terjadinya *stunting*.
- h. Pengabdian masyarakat dan KKN dapat dilakukan oleh akademisi yang berkaitan dengan permasalahan *stunting*.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Sleman

Penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman memiliki faktor penghambat dan pendukung dalam proses kolaborasi. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kolaborasi. Adapun faktor penghambatnya, yaitu kurang terjalinnya koordinasi antar *stakeholder*, adanya penolakan-penolakan dari masyarakat, pola asuh terhadap anak yang kurang baik, kondisi lingkungan yang tidak sehat, dan kurangnya pengetahuan teknologi. Selanjutnya faktor pendukung dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman, yaitu tersedianya anggaran atau dana sesuai dengan kebutuhan, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Sumber Daya Alam yang mendukung seperti hasil pertanian yang dapat dijadikan bahan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil.

4. Dampak *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Sleman

Collaborative governance sebagai bentuk upaya penanggulan *stunting* di Kabupaten Sleman memiliki dampak

yang baik bagi masyarakat maupun *stakeholder* yang terlibat. Dari pelaksanaan kolaborasi penanggulangan *stunting* adapun dampak yang timbul, yaitu tercapainya target penurunan angka *stunting* dimana setiap tahunnya mengalami penurunan bahkan melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya, masyarakat dapat mengetahui informasi dan memahami informasi terkait *stunting* yakni dengan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media-media sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, seperti Whatsapp, Instagram, Website, youtube, poster, *leaflet*, dan sebagainya, dimana media tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat saat ini.

5. Desain Kelembagaan Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman

Desain kelembagaan yang dihasilkan dalam penelitian ini yang dapat digunakan sebagai model penguatan dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman. Model ini penting diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam penanggulangan *stunting*. Model kelembagaan yang dihasilkan menggambarkan pola pertanggungjawaban dalam proses kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman, dimana proses kolaborasi melibatkan banyak *stakeholder* di dalamnya, namun belum terlalu fokus menyentuh pihak swasta untuk ikut berperan dalam penanggulangan *stunting*. Pola pertanggungjawaban atau akuntabilitas ini tidak hanya fokus pada administratif namun juga pada *stakeholder* yang terlibat, dengan adanya *multistakeholder* yang di dalamnya terdapat pemerintah, masyarakat, dan swasta yang akan terbangun jejaring yang kuat satu sama lain. Jejaring tersebut dapat bertahan apabila seimbang dalam implementasi yang terdapat pada unsur-unsur dinamika *collaborative governance*. Adapun desain kelembagaan sebagai berikut :

Gambar 1.3 Desai Kelembagaan Collaborative Governance

6. Model *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Sleman

Kolaborasi merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sama. Dalam *collaborative governance* terdapat berbagai macam model kolaborasi yang digunakan dalam menjalankan suatu kolaborasi. Adapun model kolaborasi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

Gambar 1.4 Model *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Sleman

a. Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan suatu keadaan yang menggambarkan suatu permasalahan yang timbul. Setelah mengetahui kondisi awal yang kemudian dianalisis, maka selanjutnya adalah melakukan perencanaan untuk membuat sebuah strategi untuk menyelesaikan permasalahan *stunting*. Rembug *stunting* merupakan suatu kegiatan dimana semua pemangku kepentingan

yang berkaitan dengan *stunting* khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan Bupati.

b. Kepemimpinan Fasilitatif

Peran pemimpin dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman sangatlah penting, adanya kepemimpinan fasilitatif akan mempermudah implementasi penanggulangan *stunting* dengan dibentuk dan di resmikannya Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Stunting, Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 76, dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

c. Desain Kelembagaan

Forum komunikasi diselenggarakan oleh setiap *stakeholder* atau pemangku kepentingan guna membahas semua hal yang berkaitan dengan *stunting* dan dilakukan secara rutin yang nantinya dapat menghasilkan sebuah informasi. Selanjutnya terkait bentuk komitmen dalam *Collaborative Governance* dalam upaya penanggulangan *stunting* yaitu memiliki visi, misi, tujuan yang sama untuk mencapai tujuan.

d. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi merupakan tindakan implementasi program kolaborasi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman. Program dan kegiatan dalam penanggulangan *stunting* ini terdapat beberapa program kegiatan yang telah secara rutin dilaksanakan dan digabungkan dengan program inovasi baru. Adapun program yang ada di Kabupaten Sleman yaitu Getar THAla, Gambang Stunting, Pecah Ranting, Perawan Ceria, GRASS, Kegiatan Posyandu, dan lain sebagainya, dalam implementasi program tersebut tidak bias dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan perlu peran serta dari para *stakeholder*.

e. *Outcomes*

Outcomes dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* ini adalah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu menurunnya angka *stunting* di Kabupaten Sleman, dan masyarakat lebih terdukasi terkait masalah *stunting*.

KESIMPULAN

Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Kabuten Sleman merupakan salah stu strategi yang baik untuk mengatasi masalah *stunting*. Implementasi kolaborasi dalam penaggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kolaborasi yang berjalan telah memenuhi prinsip dari dinamika *collaborative governance* yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama.

Keterlibatan berprinsip dalam proses kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman terdapat banyak *stakeholder* yang terlibat, adapun *stakeholder* yang terlibat adalaah Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pemerintah Desa, Kecamatan, Posyandu, Koordinator Bidan Desa, Puskesmas, Pengurus Ranting 'Aisyiyah Nogotirto, dan dinas-dinas lainnya yang memiliki hubungan dengan intervensi gizi baik spesifik maupaun sensitif. Keputusan yang disepakasi tentunya membutuhkan forum untuk mewadahnya, dalam hal ini forum di tingkat daerah belum terbentuk, sedangkan ditingkat bawah seperti kecamatan, desa, puskesmas, dan posyandu telah memiliki forum untuk membahas permasalahan *stunting* yang dilakukan secara rutin sesuai dengan kebijakan masing-masing.

Motivasi bersama dalam proses implementasi kolaborasi penanggulangan *stunting* para *stakeholder* tentunya memiliki pemahaman yang sama, serta memahami tugas dan wewenang masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya terkait legitimasi internal bahwa dalam kolaborasi ini sumber daya manusia yang dimiliki oleh *stakeholder* tentunya memiliki kredibilitas. Kolaborasi yang berjalan tentunya diiringi dengan adanya visi, misi, dan tujuan yang sama

serta memiliki komitmen yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan program kerja dan keselarasan program kerja.

Kapasitas aksi bersama dalam melakukan kolaborasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman telah memiliki aturan yang menjadi dasar yaitu Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Balita Stunting. Kepemimpinan dalam menjalankan kolaborasi penanggulangan *stunting* ini sudah baik dibuktikan dengan dibuatnya kebijakan dan surat keputusan. Selanjutnya terkait pengetahuan yang berupa distribusi informasi yang berkaitan dengan masalah *stunting* dilakukan menggunakan media seperti Whatshapp, Website, surat, instagram, youtube, poster, dan *leaflet*.

Aksi atau tindakan kolaborasi disini berupa inovasi-inovasi kegiatan dalam penanggulangan *stunting*, yaitu Getar Thala, Gambang Stunting, PANdu TEMan, Pecah Ranting. Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendukung, adapun faktor penghambat, yaitu adanya penolakan dari masyarakat, kondisi lingkungan yang kurang sehat, tingkat pekerjaan orang tua yang mempengaruhi pola asuh. Sedangkan faktor pendukung yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, hasil sumber daya alam, dan anggaran. Dampak adanya kolaborasi dalam upaya penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman yaitu menurunnya angka *stunting* serta masyarakat lebih teredukasi dengan adanya distribusi informasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholder*.

Desain kelembagaan *collaborative governance* ini menggunakan pola akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban. Dimana model ini dimulai dengan adanya koordinasi antar *stakeholder* yang kemudian membuat komitmen bersama dan melakukan dialog *face to face* untuk menghasilkan peraturan atau kebijakan, setelah itu implementasi program, melakukan monitoring dan evaluasi yang nantinya menuju akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Batiro, Bancha. 2017. *Determinants of Stunting among children aged 6-59 months at Kondo Didaye Woreda, Wolaita Zone, Southern Ethiopia: Unmatched case control study*. PLOS ONE. 12(12)
- Choi, Taehyong. 2014. *Revisitng The Relevance of Collaborative Governance to Korean Public Administration*, The Korean Jurnal Of Policy Studies,. Vol 29. No. 2 . PP. 21-41.
- Emerson, Kirk dkk,.2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, Oxford Universary Press on behalf of the Journal of Public Administration Research and Theory
- Islamy,La Ode Syaiful. 2018. *Collaborative Governance : Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Deepublish.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2018, *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan : Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Jakarta: Pusdatin Kementerian Kesehatan RI
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. *Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 dan tahun 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Purwanti, Nurul Dwi. 2016. *Kebijakan Publik & Pemerintahan Kolaboatif : isu-isu Kontemporer (Colaborative Governance)*. Yogyakarta : Gava Media.
- Ramayulis, Rita dkk. 2018, *STOP Stunting dengan Konseling Gizi*. Jakarta :Penebar Plus⁺ (Penebar Swadaya Grup)
- Seigler, D., 2011. *Renewing democracy by engaging citizen in shared governance*. *Public administration review*

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Aditya, Ivan. 19,8 Persen Anak di DIY *Stunting*.KR Jogja.com. 7 April 2018. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/198-persen-anak-di-diy-stunting/>. Diakses pada 21 September 2020.